

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARTA JAYA

Fika Attaqy<sup>1</sup>, Khairudin<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung  
Email: fika.18025011@student.ubl.ac.id<sup>1</sup>, khairudin@ubl.ac.id<sup>2</sup>

### Abstract

*The implementation of the village fund management budget in Karta Jaya Village is still experiencing problem lies in human resources in managing the APBDes accountability report that is still inadequate, delays in the decline of the APBD, and iys implementation is still not good. This research is important to do to assess and evaluate financial management through transparency and accountability. The method used in this study is a qualitative descriptive research method using direct interviews with the Village Head and Secretary in Karta Jaya Village, and the data analysis technique used uses 3 stages, namely data reduction, data display, and verification and conclusion. The results of this study indicate that the Karta Jaya village government has implemented the principles of transparency and accountability well.*

**Keyword:** Transparency; Accountability; Village Fund Management

### Abstrak

Penyelenggaraan anggaran pengelolaan dana desa di Desa Karta Jaya masih mengalami masalah, masalah yang terjadi terletak pada sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes masih kurang memadai, keterlambatan turunnya APBD, dan pelaksanaannya pun masih kurang baik. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa melalui transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemereintah desa Karta Jaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik.

**Kata kunci:** Transparansi; Akuntabilitas; Pengelolaan Dana Desa

## PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Karta Jaya masih mengalami masalah, masalah yang terjadi terletak pada sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban dana desa, keterlambatan turunnya dana desa, dan pelaksanaannya pun masih kurang baik. Pentingnya Pengelolaan Anggaran Dana Desa untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat (Herlianto, 2017). Transparansi penting karena menyediakan keterangan pengelolaan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat melalui peninjauan bahwa masyarakat mempunyai wewenang untuk melihat secara terbuka dan menyeluruh bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola keuangan desa (Didjaja & Mustofa, 2003).

Akuntabilitas sangat penting sebagai suatu pertanggung jawaban kepada pihak yang diberi keyakinan oleh masyarakat untuk mencapai suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kwajibannya tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sangki et al.,

2017). (Sulistiani & Ridho, n.d.) mengemukakan bahwa transparansi dan akuntabilitas ialah kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa melalui transparansi dan akuntabilitas.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa bisa dikatakan untuk merencanakan biaya fungsional keuangan pemerintah daerah, terdapat salah satu kelompok yang membuat taksiran pembiayaan uang sebesar-besarnya untuk mendanai kegiatan daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran tertentu, dan kelompok lain memperkirakan sumber pendapatan daerah untuk menutupi pembiayaan-pembiayaan tersebut (Abdul, 2008). Transparansi adalah suatu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi menurut (Werimon et al., 2007) memiliki 2 sudut pandang, yaitu komunikasi publik dengan pemerintah dan wewenang masyarakat untuk mengakses informasi. Kerangka pemikiran dalam menerapkan prinsip transparansi kelompok sektor publik mempunyai empat spesifikasi yang terdiri dari sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran kinerja, diterapkannya audit sektor publik, dan bergunanya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*) (Werimon et al., 2007).

Penerapan akuntabilitas pada pemerintah daerah bisa disebut sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan implementasi pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah demi mencapai tujuan yang ditentukan lewat pertanggung jawaban yang dianggap baik dari kualitas dan kuantitasnya.

## **METODE**

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Desa Karta Jaya, peneliti juga mewawancarai sebagian masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Prinsip Transparansi**

Transparansi diperlukan sebagai penyedia keterangan melalui sistem informasi dan penyimpanan yang bisa didapat dengan mudah. Menurut Kepala Desa, Desa Karta Jaya telah menerapkan prinsip transparansi dengan cara melaporkan hasil penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan melakukan percetakan banner serta masyarakat dapat secara langsung mendatangi kantor desa. Hal tersebut juga ditekankan oleh Bendahara Desa.

“Pemerintah setransparan mungkin untuk keuangan dana desa, contoh pemerintah desa membuat banner disitu dilaporkan jumlah pendapatan desa, jumlah belanja desa, jumlah pendapatan asli daerah berapa dan surplus desa itu juga dilaporkan semuanya. Pemerintah desa juga memasang banner disetiap titik pembangunan disitu dijelaskan jenis

kegiatannya apa, anggarannya berapa, luas dan lebar nya berapa disiti sudah dijelaskan semua”.

Jadi, untuk prinsip transparansi Pemerintah Desa Karta Jaya telah menerapkan prinsip transparansi tersebut kepada masyarakat.

## 2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Sesuai dengan pertanyaan narasumber yang mengatakan bahwa disetiap akhir tahun pemerintah desa melaporkan laporan pertanggung jawaban yang dikumpul di kecamatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa:

“Setiap pembangunan atau kegiatan yang sudah selesai langsung dibuat laporan dan kami laporkan melalui Ospam, melaporkan berkas-berkas kepada atasan, dan ada pemeriksaan langsung dari tingkat kecamatan yang akan melihat sudah selesai atau belum dan jika ada temuan kita tidak bisa mendapatkan dana untuk selanjutnya. Jadi pemerintah desa tidak asal melakukan setiap kegiatan, semua harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat hingga inspektorat”.

## Pembahasan

### 1. Prinsip Transparansi

Pemerintah Desa Karta Jaya yang sebelumnya dianggap belum sepenuhnya transparan karena hanya melaporkan dana desa melalui garis besar saja ternyata sudah sesuai pada aturan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas. Berdasarkan kriteria transparansi pemerintah desa telah melakukan prinsip transparansi dengan baik dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan mulai dari ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa tersebut mengenai penerapan kriteria transparansi.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Masyarakat Desa Karta Jaya Mengenai Kriteria Transparansi di Desa Karta Jaya

No	Nama	Kriteria Ketersediaan	Kriteria Aksesibilitas	Kriteria Ketepatan Waktu
1	Hendriansyah	Sangat baik, pemerintah desa selalu menyediakan papan informasi mengenai APBDes baik dari perencanaan sampai kerealisasinya. Pemdes juga selalu melibatkan masyarakat dalam	Sangat baik, masyarakat bisa mengakses melalui papan informasi yang selalu update dibalai desa, kantor desa, dan fasilitas umum lainnya. Juga bisa diakses melalui medsos pemdes	Setiap pelaksanaan pembangunan fisik desa selalu dipasang papan proyek secara tepat waktu, setiap akhir tahun anggaran selalu dipasang banner realisasi APBDes ditempat umum



		musyawarah desa untuk setiap rencana pembangunan desa		
2	Tuti Sartika	Prinsip transparansi yang diterapkan sudah cukup baik, terbuka, bentuk dari transparansi tersebut seperti adanya pemasangan banner, dan lain-lain	Masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui pengelolaan anggaran keuangan dengan cara dapat bertanya langsung dan bertatap muka dengan aparatur atau siapapun yang memiliki wewenang untuk menjelaskan mengenai hal tersebut, baik secara pribadi atau dalam musyawarah kampung	Sejauh ini dalam melakukan penerapan prinsip transparansi pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan semua hal mengenai anggaran pengelolaan keuangan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan desa
3	Heri Mulyadi	Ketersediaan pemerintah desa sudah cukup baik dalam melakukan prinsip tersebut. Masyarakat desa selalu melaporkan kepada masyarakat melalui musrenbang atau memasang banner disetiap titik pembangunan	Masyarakat dapat mendatangi kantor desa dan menanyakan langsung kepada pemerintas desa	Iya pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa
4	Apriyadi	Pemerintah desa selalu bersedia melakukan musyawarah bersama masyarakat guna membahas setiap rencana kerja	Masyarakat bisa langsung menanyakan dan mendatangi kantor desa	Pemerintah desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan desa
5	Irwan Ahmad Saputra	Ketersediaan masyarakat dalam	Masyarakat bisa langsung	Pemerintah desa selalu tepat waktu

menyampaikan segala bentuk informasi atau kegiatan sudah cukup baik	mendatangi kantor desa	dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dana desa
---	------------------------	--

Pemerintah desa juga selalu membuat laporan hasil penggunaan dana desa dengan melakukan pemasangan banner yang berisi tentang anggaran dana desa, pemerintah desa juga telah memasang banner disetiap titik pembangunan sesuai dengan format yang dibuat oleh pemerintah pusat.

## 2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas telah diterapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan kriteria akuntabilitas yang tercantun dalam Perpres No 29 tahun 2014 pelaporan pertanggungjawaban sudah dilaporkan secara relevan, spesifik, dan terukur tetapi terkadang dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa masih sering terlambat hal tersebut disebabkan karena keterlambatan informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Masyarakat Desa Karta Jaya Mengenai Kriteria Akuntabilitas di Desa Karta Jaya

No	Nama	Relevan	Spesifik	Terukur
1	Hendriansyah	Pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan dana desa secara umum kepada masyarakat	Bentuk laporan pertanggung jawaban yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan baik itu dalam bentuk pembangunan atau kegiatan lainnya	Pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan pengelolaan dengan baik kepada masyarakat
2	Tuti Sartika	Segala bentuk pengelolaan selalu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa	Pemerintah desa selalu membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan kegiatan yang telah diterapkan	Pemerintah desa mempertanggung jawabkan pengelolaan tidak secara asal mereka selalu mengikuti peraturan yang ditetapkan
3	Faizalsyah	Pertanggung jawabannya sudah cukup baik	Semua kegiatan infrastruktur atau pembangunan selalu dipertanggung	Dalam membuat laporan pertanggung jawaban pemerintah selalu



			jawabkan dengan baik	mengikuti aturan yang ada
4	Irwan Ahmad Saputra	Bentuk pertanggung jawaban di desa Karta Jaya sudah baik, pemerintah selalu mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan kepada masyarakat	Pemerintah desa membuat laporan pertanggung jawaban melihat dari anggaran-anggaran yang telah dipergunakan dengan baik	Laporan pertanggung jawaban dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
5	Ahmad Amrullah Alfahrobi	Pertanggung jawabannya sudah cukup baik dimata masyarakat	Laporan pertanggung jawaban yang dibuat sudah sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan tidak mengada-ngada	Bentuk laporan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang berlaku

## KESIMPULAN

Prinsip Transparansi telah diterapkan oleh pemerintah Desa Karta Jaya, secara rutin pemerintah melaporkan hasil penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui banner yang dipasang dikantor desa, dan pemerintah desa juga selalu memasang banner disetiap titik pembangunan. Pemerintah desa juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, walaupun dalam pelaporan terkadang masih sering terlambat hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia masih kurang memadai serta masih adanya keterlambatan informasi. Pemerintah Karta Jaya diharapkan dapat merekrut tenaga kerja yang memadai dalam mengelola anggaran pendapatan desa agar pertanggungjawaban anggaran dapat dilaporkan secara tepat. Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperbarui tentang laporan keuangan diwebsite agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah desa juga diharapkan dapat lebih aktif dalam bekerja dan mencari informasi tentang pengelolaan anggaran dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Dewi, S. N., & Subandoro, A. (2022). Analisis Praktik Etika Teknisi Akuntansi: Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera [MBS] Surabaya. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 69-78.
- Didjaja, & Mustofa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing.
- Liswatin, L., & Sumarata, R. P. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah*

Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(2), 79-88.

Moeleong, L. (2012). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja (Suatu Studi Kasus Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Sulistiani, D., & Ridho, N. A. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Lverage Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate Governance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 5 (1), 116–132.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas

Werimon, S., Imam, G., & Nasir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, 21–23.

